

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor

Busyairi Ahmad^{1*}, Sara S. Weyai².

¹Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IISIP Yapis Biak, Indonesia
*busyairiahmad90@gmail.com

²Prodi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IISIP Yapis Biak, Indonesia

Abstrak

Program pendidikan gratis merupakan salah satu program unggulan Pemerintah dan bantuan diberikan langsung oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dengan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur sudah berjalan dengan baik. Dana BOS yang diterima sekolah sudah dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk pembiayaan pendidikan khususnya biaya operasional sekolah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Gratis.

Abstract

The free education program is one of the Government's flagship programs and assistance is provided directly by the Regional Government to education units to finance the operational activities of both public and private education units. This study aims to determine the implementation of local government policies in the implementation of free education and to find out the obstacles faced in the implementation of the free education policy at SMP Negeri 4 Biak Timur, Biak Numfor Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques using observation, interviews and documentation. Qualitative data analysis techniques with several stages, namely data reduction, presentation, verification and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the free education policy at SMP Negeri 4 Biak Timur has gone well. BOS funds received by schools have been used properly, namely to finance education, especially school operational costs.

Keywords: Policy Implementation, Free Education.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan sikap profesionalisme tinggi yang dapat

dicapai melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang universal dalam kehidupan manusia, sehingga pendidikan dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kualitas manusia itu sendiri (Busyairi & Hamjah, 2020). Oleh karena itu, peningkatan Pendidikan sangat penting menjadi perhatian semua pihak terlebih pemerintah. Tujuannya adalah agar pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu menjadi salah satu harapan bangsa Indonesia dalam penyeimbangan kemampuan skill secara internasional dan relevan dengan sumberdaya alamnya agar mampu mengolah sumberdaya alamnya sendiri.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pendidikan harus dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keilmuan dan kualitas hidupnya, amterial dan spiritualnya, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat keluar dari semua problema kehidupannya berupa kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Dengan demikian, di smaping dapat meningkatkan taraf hidupnya, mereka juga dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era global ini, dan bukan sesuatu yang tidak mungkin mereka akan menjadi aktor pereyasa masa depan (Hasbullah, M, 2015).

Secara instrumental amanat Pembukaan UUD 45 dijabarkan ke dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan

bahwa pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap. warga negara. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dengan Warga Negara secara eksflisit tergambar melalui pasal 31 UUD 45 (Yanti, 2020).

Lebih lanjut Yanti dalam artikelnya menyatakan bahwa Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Oleh karena itu kebijakan secara praktis dapat di fahami sebagai keputusan pemerintah, as decision of government sebagai bentuk pengesahan formal as formal authorization, sebagai program as programme, sebagai keluaran as output, sebagai hasil akhir as outcome dan sebagai teori atau model as a theory or model serta sebagai proses as process) (Yanti, 2020).

Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 1 huruf F berbunyi "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang bersekala

Kabupaten Kota meliputi penyelenggaraan pendidikan". Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan yang sederajat (Jumadi, 2014).

H.A.R Tilaar sendiri memberikan makna yang sedikit berbeda tentang "kebijakan pendidikan", menurutnya kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (social institutions) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dengan demikian dapat kita pahami suatu kebijakan apabila tidak segera diimplementasikan, maka tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak (Mujianto Solichin, 2015).

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah pada pasal 5 menyebutkan Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional

serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan. dan pada pasal 6 menyebutkan bahwa Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; c. rencana strategis pendidikan nasional; d. rencana kerja Pemerintah; e. rencana kerja dan anggaran tahunan; dan f. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. (Indonesia, 2010).

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik adalah kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik, kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praksis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, pendidikan milik masyarakat (barang publik) maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu di dengar dan di akomodasi. Kemudian merujuk kepada filsafat moral maka kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan public (Bakry, 2010).

Adapun implementasi dari kebijakan tersebut harus mengacu dari aturan yang sudah di tetapkan dalam UU dan

peraturan tentang Pendidikan gratis itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahap analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur

Kebijakan pembangunan pendidikan peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan, demi mencapai kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun masih perlu ditingkatkan mengingat sampai dengan tahun 2019 masih banyak anak usia

sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu juga, dari data yang didapatkan bahwa dengan adanya kebijakan itu, sekolah di Biak Numfor agak kelabakan pada awalnya. Mereka bingung bagaimana harus melaksanakannya, padahal dulu bisa menarik dana dari orang tua atau komite tapi sekarang sudah tanpa pungutan dari mana-mana.

Terkadang karena keterlambatan terkadang menyebabkan pinjamng untuk operasional, padahal kadang dana yang keluar itu lebih sedikit daripada dana yang dibutuhkan. Jadi, yang paling penting dengan adanya pendidikan gratis itu sekolah harus pandai dalam pengelolaan jika tidak maka akan menjadi beban sekolah tersebut. Pihak sekolah menggunakan dana yang sudah diterima tersebut untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah.

Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: studytour (karyawisata), studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya

tidak ditanggung biaya BOS. Dan pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah. Serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biaya-biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orangtua.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan terutama pada keluarga kurang mampu adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung yang meliputi iuran sekolah, buku-buku, seragam dan alat tulis maupun biaya tidak langsung yang meliputi transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Namun dengan adanya Pendidikan gratis tersebut maka masyarakat termotivasi untuk sekolah. Oleh karena, dampak positif dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan minat belajar masyarakat.

Kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis secara umum di SMP Negeri 4 Biak Timur sudah dapat berjalan dengan cukup baik, meskipun demikian masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan

kebijakan pendidikan gratis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan pertanggung jawaban.

Kendala ini bersifat intern bagi sekolah terutama bagi pengelola dana BOS dalam menyusun laporan pertanggungjawaban BOS. Hal ini disebabkan karena persepsi yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya terdapat kekeliruan. Kondisi ini ditambah dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya.

- b. Keterlambatan pencairan dana.

Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 4 Biak Timur memerlukan biaya yang harus segera dicukupi. Yang dimaksud dengan keterlambatan pencairan dana disini adalah tidak tepatnya atau kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang seharusnya awal periode atau awal triwulan dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, tetapi kenyataannya pada awal tahun ini yaitu bulan maret baru dicairkan.

- c. Persepsi masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya.

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis ini pada awalnya sangat senang sekali karena membantu seluruh biaya pendidikan, baik operasional maupun non operasional atau pribadi. Jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya pendidikan gratis, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan di dalam pendidikan anaknya sampai dengan keperluan pribadi siswa seperti seragam sekolah.

Adapun yang dimaksud gratis disini adalah mengenai pembiayaan seluruh kegiatan operasional seperti SPP, biaya dari komite atau dana pembangunan, pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru mulai dari biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, daftar ulang, fotocopy panitia, konsumsi panitia, uang lembur panitia dan lain sebagainya. Begitu pula untuk biaya penunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran koleksi di perpustakaan.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur sudah berjalan dengan baik. Dana BOS yang diterima sekolah sudah dipergunakan

sebagaimana mestinya yaitu untuk pembiayaan pendidikan khususnya biaya operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS.

Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dana yaitu dikarenakan oleh singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.

Keterlambatan pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dalam proses pembelajaran tersebut.

Anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya secara keseluruhan, padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan gratis dalam pendidikan gratis.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, , maka penelti mengajukan beberapa saran mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis sebagai berikut :

- a. Pihak sekolah hendak selalu memberikan sosialisasi kepada wali murid dan seluruh siswa mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ini supaya tidak adanya anggapan- anggapan yang salah.
- b. Bagi guru hendaknya selalu memberikan motivasi kepada siswa bahwa dengan adanya pendidikan gratis maka mereka harus lebih semangat untuk belajar karena sudah tidak terbebani dengan masalah biaya.
- c. Pihak pemerintah hendaknya lebih serius dalam memberikan pengarahan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban agar benar dan

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal*

MEDTEK.

Busyairi, A., & Hamjah, B. (2020). PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI ERA MILENIAL (STUDI KASUS LOKA LATIHAN KERJA UKM KABUPATEN BIAK NUMFOR). *JURNAL NALAR PENDIDIKAN*, 8(2477-0515), 114-123. <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i2.15519>

Cham, Sam M dan Tuti T. Sam. (2010) Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Cet. V; Jakarta: PT. Grafindo Persada,

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier.(2006) . *Impelentasi Kebijakan* kutipan Coleman M dan Bush T Jakarta : Media Aksi

Hasbullah, M, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia. In *Edisi Ke-1*.

Indonesia, P. P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*.

Jumadi. (2014). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.

Mujianto Solichin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Studi Islam*.

Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>